



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-12/PK/PK.1/2024 4 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 10 (sepuluh) berkas
Hal : Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Gelombang II Tahun 2024

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, JF AKPD merupakan jabatan fungsional yang bersifat terbuka dan dapat diimplementasikan oleh Instansi Pusat dan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Sehubungan dengan implementasi JF AKPD, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Instansi Pembina akan menyelenggarakan uji kompetensi dalam rangka perpindahan jabatan dan kenaikan jenjang AKPD. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rangkaian Pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas: (i) Uji Tertulis, (ii) Uji Kompetensi Teknis, dan (iii) Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultral.
2. Instansi Pusat dan Daerah dapat mengusulkan pegawai/pejabat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi JF AKPD.
3. Surat usulan peserta uji kompetensi disampaikan secara kolektif oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah/BKPSDM/pimpinan unit yang membidangi kepegawaian di Instansi Pusat dan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui tautan <https://bit.ly/ujikomakpd2024> paling lambat hari Minggu, 11 Agustus 2024 dengan dilengkapi berkas persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
4. Dengan diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi JF AKPD, maka Instansi Pengusul dianggap telah berkomitmen untuk memproses pengangkatan peserta yang lulus uji kompetensi ke dalam jenjang JF AKPD yang dituju pada unit kerja teknis non kesekretariatan yang menangani bidang HKPD yaitu bidang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, atau perencanaan pembangunan daerah.
5. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD, dalam hal Instansi Pengusul tidak mengangkat peserta yang lulus uji kompetensi sesuai rekomendasi dari Instansi Pembina, maka Instansi Pengusul dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan permohonan mengikuti uji kompetensi JF AKPD selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
6. Bagi instansi yang telah menyampaikan usulan peserta uji kompetensi JF AKPD sebelum surat ini diterbitkan, wajib menyampaikan kembali usulan peserta uji kompetensi dengan memperbarui berkas persyaratan sesuai ketentuan.
7. DJPK akan menyampaikan surat hasil verifikasi berkas melalui unit yang membidangi kepegawaian pada instansi pengusul beserta informasi terkait jadwal, lokasi, dan tata tertib pelaksanaan uji kompetensi.

8. Kementerian Keuangan tidak menanggung biaya perjalanan dinas bagi peserta ke lokasi uji kompetensi.
9. Dokumen persyaratan uji kompetensi yang tidak jelas/tidak lengkap/tidak sesuai ketentuan dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut.
10. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat mengkoordinasikan hal-hal terkait pelaksanaan uji kompetensi JF AKPD ini kepada para pegawai yang bersangkutan.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah/BKPSDM/Unit Pengelola Kepegawaian di Instansi Pengguna JF AKPD Daerah



Berkas Persyaratan Uji Kompetensi JF AKPD

A. Berkas Umum:

1. Dokumen ketersediaan kebutuhan/formasi JF AKPD yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. SK pengangkatan PNS.
3. SK kepangkatan terakhir.
4. Daftar Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2022 dan 2023 dengan predikat minimal "Baik".
5. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II yang menunjukkan pengalaman terkait bidang HKPD minimal 2 tahun.
6. Scan KTP Asli.
7. Pas foto berwarna terbaru 3 x 4 cm.
8. Alamat email dan nomor *Whatsapp* Aktif (untuk dimasukkan ke dalam grup calon peserta).
9. Karya tulis yang dibuat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sesuai format Lampiran III yang telah ditentukan dengan tema pilihan yaitu:
 - a. Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
 - b. Hukum Administrasi Keuangan Negara; atau
 - c. Desentralisasi Fiskal.
10. Surat Pernyataan Orisinalitas sesuai format dalam Lampiran IV yang menyatakan keaslian karya tulis sebagaimana angka 9.
11. Surat izin untuk mengikuti uji kompetensi yang telah ditandatangani oleh pimpinan instansi sesuai format dalam Lampiran V.
12. Surat pernyataan kesanggupan dari Sekretaris Daerah/Sekretaris Jenderal atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memproses pengangkatan peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi ke dalam JF AKPD sesuai format dalam Lampiran VI (disampaikan setelah calon peserta dinyatakan lolos verifikasi berkas).
13. Surat keterangan sebagai kandidat/*talent* untuk pengisian jabatan target dan bebas hukuman disiplin yang ditandatangani oleh pimpinan unit pengelola kepegawaian instansi sesuai format dalam Lampiran VII.
14. Bukti *screenshot* sertifikat pelatihan sebagai bukti kelulusan atas pelatihan *E-Learning* Pengantar Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan *E-learning* Pengantar Pengelolaan Keuangan Daerah (pelatihan dapat diakses pada tautan <https://linktr.ee/ukomakpd2024>) sesuai format dalam Lampiran X.

Catatan:

Dalam rangka mendukung pengembangan karir AKPD, penyampaian usulan harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan dan mengutamakan pengisian jabatan dari kenaikan jenjang AKPD.

B. Berkas Khusus:

a. Kenaikan Jenjang AKPD

1. Surat Keputusan Pengangkatan/Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
2. Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) atas kinerja Tahun 2022 dan 2023 yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif (AKK);
3. Hasil kerja berupa karya tulis/*policy brief*/laporan hasil analisis bidang HKPD yang dibuat pada Tahun 2022 dan 2023.
4. Syarat tambahan untuk kenaikan jenjang Ahli Muda menjadi Ahli Madya yaitu fotokopi karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terindeks Sinta (*Science and Technology Index*) atau minimal 3 (tiga) kajian inisiatif kebijakan baru yang dapat diimplementasikan yang disertai berita acara pengujian secara panel oleh tim ahli atas kajian inisiatif kebijakan baru pejabat fungsional AKPD tersebut. Jurnal atau 3 kajian inisiatif kebijakan dimaksud harus dibuat dalam masa jabatan sebagai AKPD Ahli Muda.

b. Perpindahan dari Jabatan Lain

1. Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
2. SK terakhir jabatan struktural/fungsional lainnya;
3. Surat pernyataan yang diketahui atasan langsung sesuai dengan format dalam Lampiran VIII;
4. Surat keterangan dari pimpinan sesuai dengan format dalam Lampiran IX;

Catatan:

1. Berkas diunggah dalam format file pdf untuk masing-masing peserta (untuk foto dalam format PNG/JPG).
2. Berkas yang tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan tidak akan diproses.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



LAMPIRAN II
 Surat Direktur Jenderal
 Nomor : S-12/PK/PK.1/2024
 Tanggal : 4 Juli 2024

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Riwayat Hidup				
I. DATA PRIBADI				
1.	Nama Lengkap			
2.	NIP			
3.	Pangkat/Gol. Ruang			
4.	Tempat dan Tanggal Lahir			
5.	Unit Kerja			
6.	Instansi			
II. PENDIDIKAN				
NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/PROG.STUDI	TAHUN LULUS
1.				
2.				
III. KURSUS/PELATIHAN				
NO.	NAMA KURSUS/PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/PELATIHAN	TAHUN
1.				
2.				
IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL				
NO.	JABATAN	NOMOR SK (SURAT KEPUTUSAN)	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				
V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL				
NO.	JABATAN	NOMOR SK (SURAT KEPUTUSAN)	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				
VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN				
NO.	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	NOMOR SK (SURAT KEPUTUSAN)	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1.				
2.				
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah.				
Mengetahui: (Pimpinan Unit Teknis)			(Tempat, tanggal)	Yang membuat pernyataan
..... NIP.....		 NIP.....	

* Batas usia pendaftar uji kompetensi JF AKPD yaitu 2 tahun sebelum usia pensiun

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
 Ludiro



FORMAT PENULISAN KARYA TULIS

1. Judul karya tulis
2. Abstrak
3. Pendahuluan
 - Latar belakang
 - Tujuan karya tulis
 - Rumusan masalah/pertanyaan riset
 - Kontribusinya terhadap organisasi/pengetahuan
4. Tinjauan Literatur
 - Memaparkan teori-teori/hasil karya tulis yang telah dilakukan sebelumnya dan mengkaitkannya dengan karya tulis yang akan diusulkan (perbandingan teori, best practice, pengalaman daerah/negara lain)
5. Metodologi Penelitian
 - Memaparkan metode yang akan digunakan dan menjelaskan mengapa metode tersebut digunakan
 - Metode pengumpulan data (wawancara, kuesioner/survey, dokumentasi, dll) dan metode pemilihan partisipan karya tulis/riset
6. Pembahasan dan Analisis
 - Penulisan hasil dari lapangan/riset
 - Analisis terhadap hasil riset berdasarkan teori/hasil kajian riset terdahulu
 - Menuliskan faktor-faktor penting yang menjelaskan hasil analisis
7. Simpulan
 - Menuliskan simpulan yang relevan berdasarkan teori, hasil temuan, dan analisis (tidak menuliskan/menambahkan sesuatu yang baru dalam kesimpulan)
 - Menuliskan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan yang relevan terkait hasil kajian (limitasi kajian)
 - Simpulan dan saran

Catatan: karya tulis dibuat dalam 10 – 15 halaman, ukuran kertas A4.

Pilihan Tema:

1. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2. Desentralisasi Fiskal
3. Hukum Administrasi Keuangan Negara

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



FORMAT SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Instansi :

Pemerintah Daerah :

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ini yang berjudul..... adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

(Tempat, tanggal)

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

(Nama / NIP)

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



LAMPIRAN V
Surat Direktur Jenderal
Nomor : S-12/PK/PK.1/2024
Tanggal : 4 Juli 2024

FORMAT SURAT IZIN ATASAN

KOP SURAT
SURAT IZIN ATASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi/Pemda :
Jabatan :

Dengan ini memberikan izin kepada pegawai di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi/Pemda :
Jabatan :

untuk mengikuti pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)

Yang Memberikan Izin,
(Jabatan Pimpinan Instansi)

(Nama / NIP)

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



LAMPIRAN VI
Surat Direktur Jenderal
Nomor : S-12/PK/PK.1/2024
Tanggal : 4 Juli 2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGANGKATAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGANGKATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Pemda/KL :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memproses pengangkatan pegawai di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Pemda/KL :

ke dalam Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sesuai surat rekomendasi hasil uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina JF AKPD pada unit kerja non kesekretariatan yang menangani bidang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Apabila pegawai tersebut tidak diangkat sesuai rekomendasi dari Instansi Pembina, maka saya atas nama Instansi bersedia untuk dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan permohonan uji kompetensi JF AKPD selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang Membuat Pernyataan,
(Sekretaris Daerah/Sesditjen)

(Nama / NIP)

Catatan:

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengangkatan disampaikan setelah peserta dinyatakan lolos verifikasi berkas.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



LAMPIRAN VII
Surat Direktur Jenderal
Nomor : S-12/PK/PK.1/2024
Tanggal : 4 Juli 2024

FORMAT SURAT KETERANGAN *TALENT* DAN BEBAS HUKDIS

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Pemda/KL :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa pegawai di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Pemda/KL :

Merupakan kandidat/*talent* untuk pengisian jabatan target dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang Membuat Pernyataan,
(Kepala Badan/Biro Kepegawaian)

(Nama / NIP)

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
2. tidak rangkap jabatan;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
4. bersedia untuk melaksanakan kegiatan analisis keuangan pusat dan daerah secara aktif; dan
5. telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)
NIP.....

Mengetahui,
(tempat,tanggal)
Jabatan Atasan Langsung

(.....)
NIP.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



FORMAT SURAT KETERANGAN

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin;
2. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
3. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang Membuat Pernyataan,
Jabatan Atasan Langsung

(.....)
NIP.....

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan

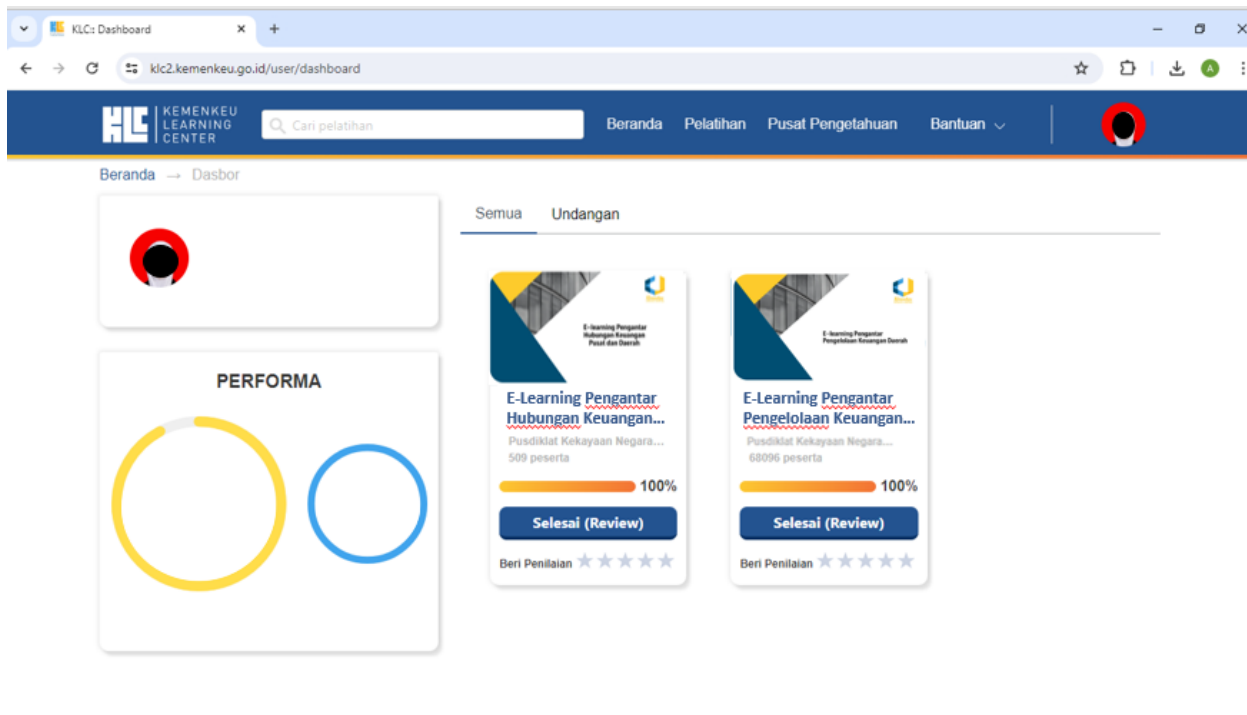


Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



LAMPIRAN X
Surat Direktur Jenderal
Nomor : S-12/PK/PK.1/2024
Tanggal : 4 Juli 2024

Contoh Bukti *Screenshot* telah Mengikuti Pelatihan



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

